



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# GAMBARAN PERIZINAN USAHA

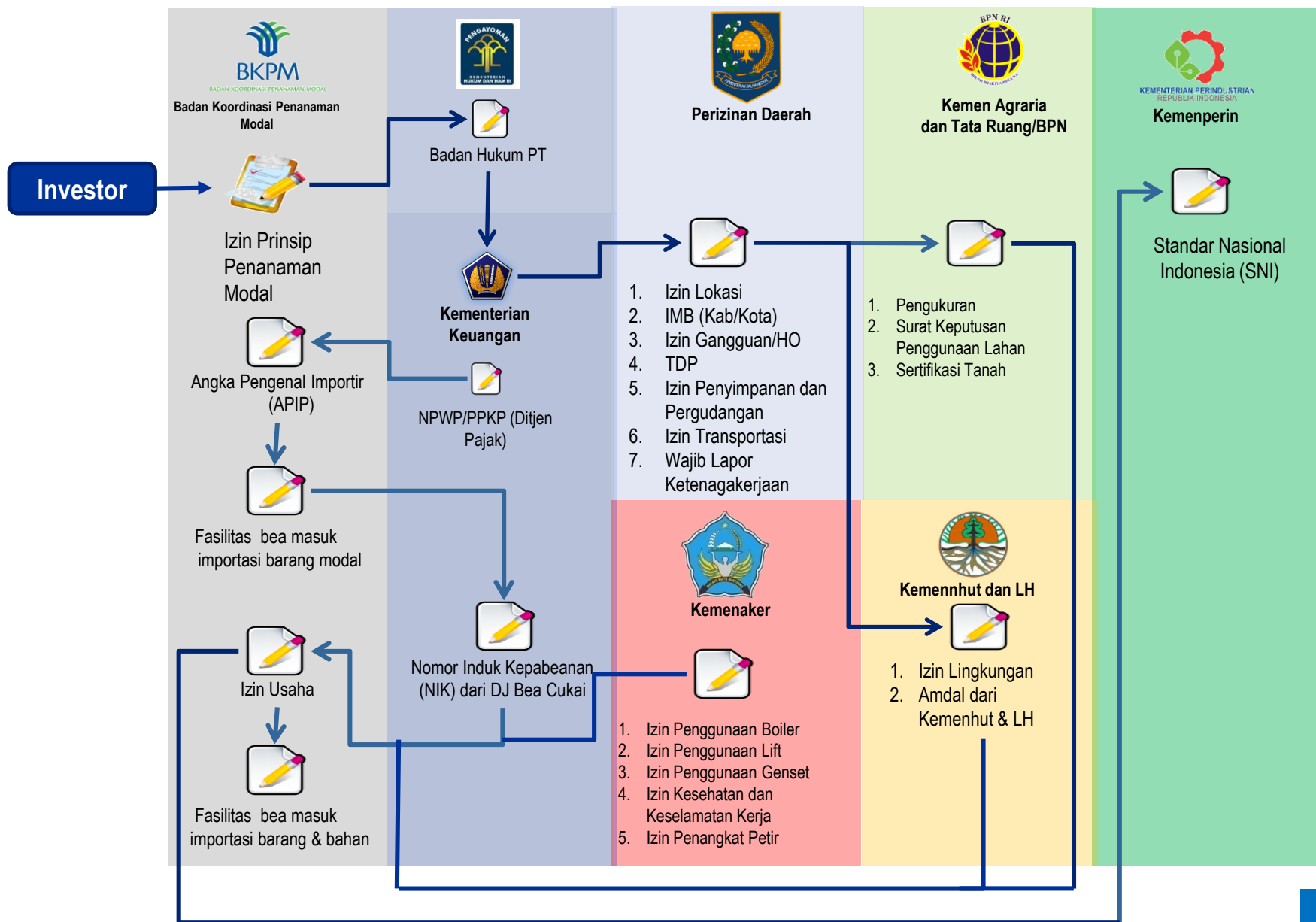
# JUMLAH PERIZINAN

1. Jumlah peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha sampai dengan tahun 2012 menurut data JICA-Kemenko Perekonomian sebanyak 1.150 peraturan
2. **Perizinan Ekspor:**
  - ✓ Perizinan dasar: Surat Izin Usaha Perdagangan
  - ✓ Jumlah komoditi yang diatur tata niaga eksportnya: 2278 komoditi
  - ✓ Jenis perizinan:
    - **Eksportir Terdaftar** (Timah, Batubara, Mutiara, Produk Kehutanan, Migas, Bahan Bakar Lainnya, Burung Walet, Produk Pertambangan hasil Pengolahan dan Pemurnian, Produk Industri Kehutanan, Kopi)
    - **Surat Persetujuan Ekspor** (Beras, Produk Pertambangan, Kayu Ulin, Produk Perikanan, Produk Peternakan, Pupuk Urea Non Subsidi, Skrap, Kopi, Intan Kasar, Prekursor, Hewan dan Produk Hewan, Tumbuhan Alam dan Satwa liar, Timah Murni Batangan, Timah Industri, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi)
    - **Laporan Surveyor:** (Galian Golongan C, Beras, Kayu, PP Tertentu, Produk Pertambangan, Prekursor non farmasi, Rotan, Timah, Produk Pertambangan, Batubara, Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya, Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain)
  - ✓ Jumlah peraturan tata niaga dan larangan ekspor sebanyak 53 peraturan
  - ✓ Instansi Penerbit Perizinan, Kemendag, Kemenkes, Kemen LHK, Badan Karantina Tumbuhan
3. **Perizinan Impor:**
  - ✓ Perizinan dasar: Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang terbagi per seksi komoditi untuk setiap perusahaan dan API Produsen
  - ✓ Jumlah peraturan tataniaga dan larangan impor sebanyak 79 peraturan
  - ✓ Jumlah komoditi yang diatur sebanyak 11.534 komoditi
  - ✓ Jenis perizinan:
    - **Importir Terdaftar (IT):** IT Besi atau Baja; IT Cakram Optik; IT Bahan Peledak Industri (Komersial); IT Garam; IT Intan Kasar, IT Nitro Cellulose; IT Prekursor Non Farmasi; IT Produk Tertentu - Alas Kaki; IT Produk Tertentu – Elektronika, IT Produk Tertentu - Mainan Anak-anak; IT Produk Tertentu - Pakaian Jadi; IT Produk Tertentu - Produk Makanan dan Minuman; IT Sakarin dan Garamnya; IT Gula Kristal Putih; IT Bahan Berbahaya (B2); IT BPO; IT Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna; IT Minol; IT Hewan dan Produk Hewan; IT Produk Hortikultura; IT Produk Tertentu – Kosmetik; IT Produk Tertentu - Obat Tradisional dan Herbal; IT Telepon Seluler; IT Produk Hewan
    - **Importir Produsen (IP):** IP Bahan Berbahaya; IP Beras; IP Besi atau Baja; IP BPO Metil Bromida; IP BPO Non Metil Bromida; IP Etilena; IP Gula Kristal Mentah; IP Gula Kristal Rafinasi; IP Limbah Non B3; IP Nitrocellulose; IP PCMX; IP Pelumas; IP Plastik; IP Prekursor Non Farmasi; IP Tekstil; IP Cengkeh; IP Garam Industri, IP Garam Konsumsi; IP Limbah Non B3 – Kaca; IP Limbah Non B3 – Kertas; IP Limbah Non B3 – Plastik; IP Limbah Non B3 - Potongan Kain; IP Limbah Non B3 - Skrap Karet; IP Limbah Non B3 - Skrap Logam; IP Holtikultura; IP Sodium Tripolyphosphate (STPP)
    - Surat Persetujuan Impor
    - Laporan Surveyor: Limbah B2, Ban Bertekanan, Beras, Besi Baja, BPO, Cakram Optik, Elektronik, Garam, Gula, Holtikultura, Intan Kasar, Kaca Lembaran, Keramik, Kosmetik, Limbah Non-B3, Mainan Anak-anak, Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin yang menggunakan BPO, Mutiara, Nitro Cellulose, Obat Tradisional, Pangan, Prekursor, Semen, Sepatu dan alas kaki, TPT
    - Surat Keterangan Impor
    - Surat Pendaftaran Barang SNI
    - Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia
    - Persyaratan Perizinan, antara lain terdiri dari: rekomendasi, surat pendaftaran tipe barang, sertifikat produk penggunaan tanda SNI, dsb
    - Instansi Penerbit Perizinan, adalah sebanyak 15 K/L atau 15 unit penerbit perizinan, yaitu antara lain: Kemdag, Kemenperin, Kementan, Kemen LHK, Polri, TNI, Kemen KKP, Kominform, Bapeten, BPOM, Kemenkes, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, Kemen ESDM, dsb.

---

# **GAMBARAN PERIZINAN INVESTASI (DI LUAR KEGIATAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN) BEBERAPA SEKTOR**

# Alur Perizinan Investasi Bidang Perindustrian

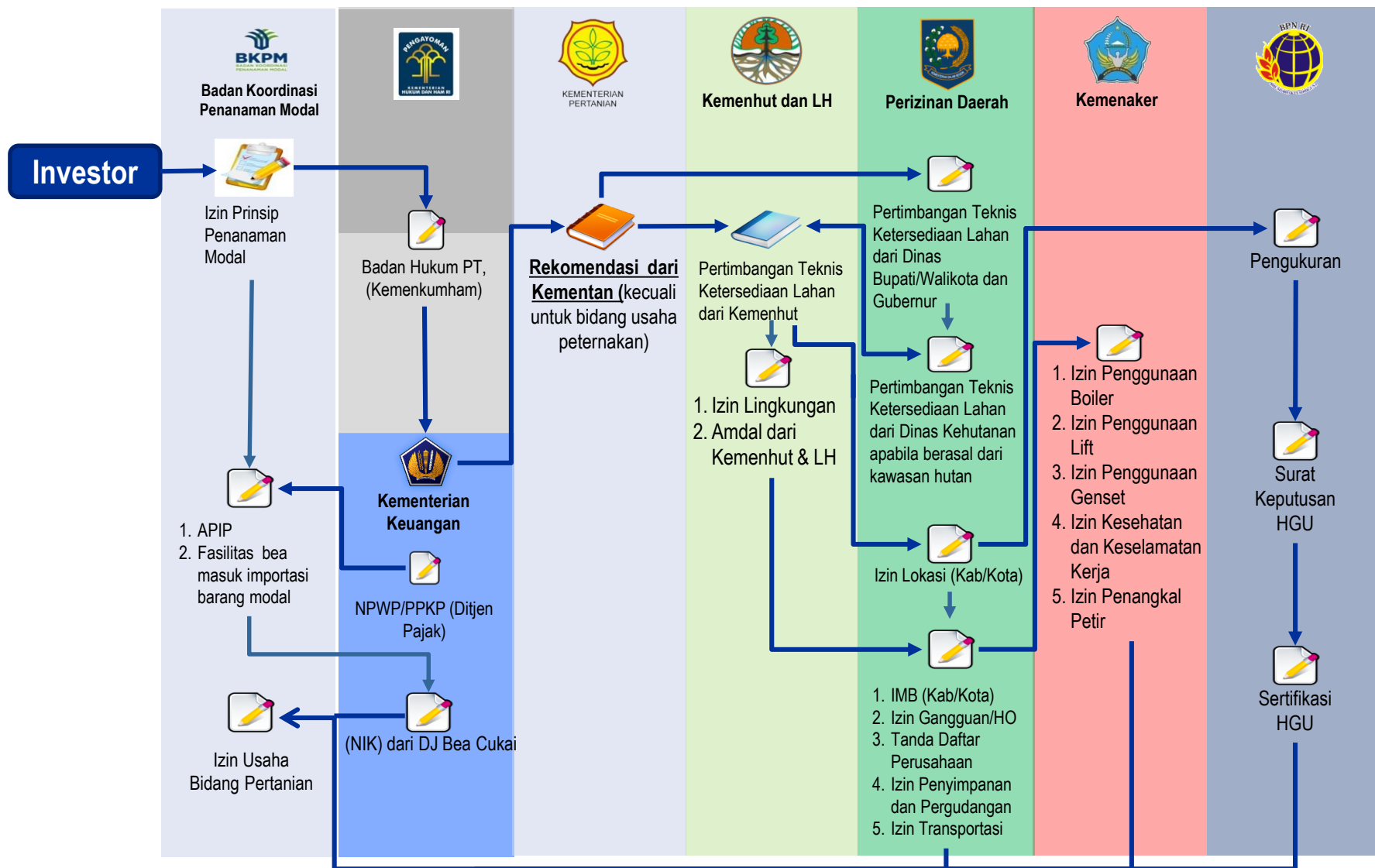


# Lama Proses Perizinan Bidang Perindustrian

	JENIS IZIN / NON IZIN	SOP (HARI)	REKOMENDASI PENYEDERHANAAN DARI BKPM	USUL SOP (HARI)
BADAN USAHA	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Single Submission badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan Izin Prinsip Penanaman Modal.</li> <li>- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (<i>single submission application</i>).</li> <li>- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.</li> </ul>	3
	Badan Hukum PT	1		
	NPWP/NPPKP	1		
	TDP	3		
KONTRUKSI/REALISASI	Ketetapan Rencana Kota	15	Ketetapan Rencana Kota dan penetapan Lokasi dijadikan satu proses, berdasarkan peta wilayah usaha dengan peta RTRW provinsi dan kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).	14
	Izin Lokasi/SITU	14		
	Izin Lingkungan dan AMDAL	115	Izin lingkungan diluar studi ANDAL atau UKL/UPL.	10
	AMDAL LALIN	90		
	Izin Gangguan di Daerah	14		
	Izin Mendirikan Bangunan	14	Izin Mendirikan Bangunan	14
	Hak Atas Tanah (HGB)	165	Hak Atas Tanah (HGB) dilakukan penyederhanaan SOP	7
	Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll)	23	Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll)	7
	Utilitas (Listrik, air, telepon)	50	Utilitas (Listrik, air, telepon)	40
	BPJS	1	BPJS	1
	Fasilitas (API, Masterlist, TA, TH)	25	Fasilitas (API, Masterlist, TA, TH) disederhanakan sesuai SOP	14
PERLINDUNGAN KONSUMEN	Izin Usaha	7	Izin Usaha	7
	Pendaftaran Produk	7	Penyederhanaan Izin-Izin Perlindungan Konsumen digabung menjadi satu proses atau menjadi simultan	25
	Izin Edar (untuk mamin)	26		
	SNI	98		
<b>Total Penyelesaian</b>		<b>672<sup>*)</sup></b>	<b>Total Penyelesaian</b>	<b>152</b>

\*) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah

# Alur Pengurusan Izin Investasi di Bidang Pertanian

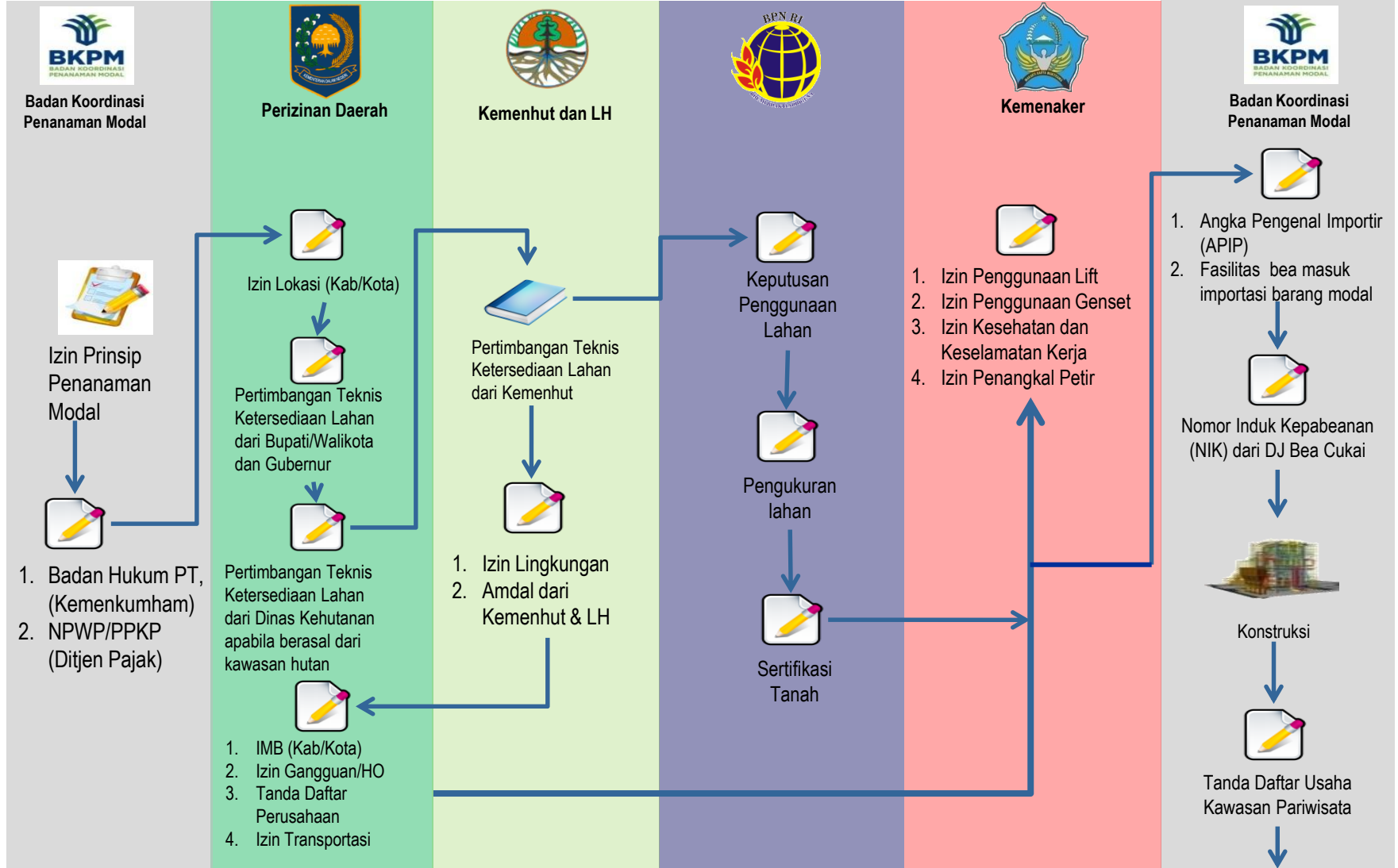


# Lama Proses Perizinan Bidang Pertanian (Perkebunan)

	JENIS IZIN / NON IZIN	SOP (HARI)	REKOMENDASI PENYEDERHANAAN DARI BKPM	USUL SOP (HARI)
BADAN USAHA	Badan Hukum PT	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Single Submission</i> Badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan Izin Prinsip Penanaman Modal.</li> <li>- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (<i>single submission application</i>).</li> <li>- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.</li> </ul>	3
	NPWP/NPPKP	1		
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3		
	Izin Prinsip Penanaman Modal	3		
KONSTRUKSI/REALISASI	Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan	17	- Rekomtek Perkebunan sudah mencakup: Pertimbangan Teknis kehutanan, penetapan Lokasi, berdasarkan peta wilayah usaha dengan peta RTRW provinsi dan kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).	20
	Pertimbangan Teknis Lahan dari Dinas Kehutanan	30		
	Izin Lokasi/SITU	14		
	Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan	120	- Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan mengacu kepada Rekomtek	15
	Izin Lingkungan dan AMDAL	115	- Izin lingkungan di luar studi ANDAL	10
	AMDAL LALIN	90		
	Izin Gangguan di Daerah	14	IUP Daerah <b>dihapus</b> karena informasi telah dicakup dalam Izin Usaha	-
	IUP Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota)	57		
	Hak Atas Tanah (HGU)	165	Hak Atas Tanah (HGU) dilakukan penyederhanaan SOP	40
	Izin Mendirikan Bangunan	14	Izin Mendirikan Bangunan	14
	Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll)	23	Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll)	7
	Utilitas (Listrik, air, telepon)	50	Utilitas (Listrik, air, telepon)	40
	BPJS	1	BPJS	1
	Fasilitas (API dan Masterlist)	10	Fasilitas (API dan Masterlist)	10
	Izin Pemasukan Benih	16	Izin Pemasukan Benih	5
Izin Usaha	7	Izin Usaha	7	
<b>Total Penyelesaian</b>		<b>751<sup>*)</sup></b>	<b>Rekomendasi Total Penyelesaian</b>	<b>182</b>

\*) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah

# Bagan Alur Tanda Daftar Kawasan Pariwisata





# Lama Proses Perizinan Kawasan Pariwisata

	Jenis Izin / Non Izin	SLA (Hari)	Rekomendasi Penyederhanaan dari BKPM	SLA (Hari)
Badan Usaha	Badan Hukum PT	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Single Submission badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan Izin Prinsip Penanaman Modal.</li> <li>- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (<i>single submission application</i>).</li> <li>- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.</li> </ul>	3
	NPWP/NPPKP	1		
	TDP	3		
	Izin Prinsip Penanaman Modal	3		
Konstruksi/Realisasi	Izin Lokasi	14	- Pertimbangan Teknis kehutanan, penetapan Lokasi, berdasarkan peta wilayah usaha dengan peta RTRW provinsi dan kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).	15
	Pertimbangan Teknis Lahan dari Dinas Kehutanan	30		
	Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan	120	Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan	52
	Izin Lingkungan dan AMDAL	115	- Izin lingkungan di luar studi ANDAL atau UKL/UPL	10
	AMDAL LALIN	90		
	Izin Gangguan di Daerah	14		
	Hak Atas Tanah (HGU)	165	Hak Atas Tanah (HGU)	50
	Izin Mendirikan Bangunan	14	Izin Mendirikan Bangunan	14
	Ketenagakerjaan	23	Ketenagakerjaan	23
	BPJS	1	BPJS	1
	Utilitas (Listrik, air, telepon)	50	Utilitas (Listrik, air, telepon)	40
	Fasilitas (API dan Masterlist)	10	Fasilitas (API dan Masterlist)	10
Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	7	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	7	
<b>Total Penyelesaian</b>		<b>661<sup>*)</sup></b>	<b>Total Penyelesaian</b>	<b>188</b>

\*) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah

# Matriks Perizinan Pelabuhan/Terminal Khusus

	Jenis Izin / Non Izin	Instansi	SLA (Hari)
BADAN USAHA	Izin Usaha Pokok	PTSP Pusat	7
	Badan Hukum PT	Kemenkumham	1
	NPWP/NPPKP	DJP, Kemenkeu	1
	TDP	PTSP Kab/Kota	3
IZIN PENETAPAN LOKASI PELABUHAN/TERMINAL KHUSUS	Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT)	Kemen ATR/BPN	7
	Izin Lokasi/SITU	PTSP Kab/Kota	14
	Izin Pelepasan/Pinjam Pakai Kawasan Hutan	PTSP Pusat	52
	Studi ANDAL	Konsultan	150
	Izin Lingkungan	Kemen LHK	10
	Rekomendasi Bupati/Walikota	Kab/Kota	14
	Kantor Distrik Navigasi	Kemenhub	n/a
	Rekomendasi Syahbandar	Kemenhub	n/a
	Rencana Induk Terminal Khusus	Bupati/Walikota	14
	Studi Kelayakan	Konsultan	150
	Laporan Keuangan 1 tahun terakhir	Akuntan Publik	7
	Hasil survei yang meliputi hidroceanografi, topografi, titik nol ( <i>benchmark</i> ) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis	Konsultan	7
	Referensi Bank Nasional dengan aset > Rp. 50 triliun	Bank	1
	Hak Atas Tanah	Kemen ATR/BPN	50
	Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus	Kemenhub	5
KONSTRUKSI	Izin Mendirikan Bangunan	PTSP Kab/Kota	14
	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Disnaker	23
	Utilitas (air, telepon)	PAM/Telkom	14
	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	BPJS	1
	Pembebasan Bea Impor Barang Modal	PTSP Pusat	7
IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN	Rekomendasi Syahbandar	Kemehub	n/a
	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir diaudit	Akuntan Publik	7
	Hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur pelayaran	Konsultan	30
	Sertifikat ketersediaan SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Kemenhub	n/a
	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan/Terminal Khusus	Kemenhub	19
<b>Total Penyelesaian</b>			<b>608</b>